

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : II
Rapat ke- : 8
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi IV DPR RI mengenai Kelapa Sawit dengan:
1. Ketua Umum Asosiasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI);
 2. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO);
 3. Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Kelapa Sawit (POPSI);
 4. Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS); dan
 5. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR).
- Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 23 November 2020
Waktu : 14.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : Masukan mengenai penggunaan Dana Perkebunan untuk Peremajaan Kelapa Sawit.
- Ketua Rapat : G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/ F-GERINDRA)
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. Anggota dari 28 Anggota Panja
- B. Hadir:
1. Joko Supriyono (Ketua GAPKI);
 2. H. Alpian (Ketua Umum APKASINDO);
 3. Pahala Sibuea (Ketua Umum POPSI);
 4. Mansuetus Darto (Sekjen SPKS); dan
 5. Juwita Yaidi (ASPEKPIR Kalbar).
- beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

RDPU Panja Komisi IV DPR RI mengenai Kelapa Sawit dengan Ketua Umum GAPKI, Ketua Umum APKASINDO, Ketua Umum POPSI, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), dan Ketua Umum ASPEKPIR dibuka pukul 14.30 WIB oleh Ketua Rapat, G. Budisatrio Djiwandono dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN:

1. Legalitas lahan menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan peremajaan Kelapa Sawit, sehingga kinerja peremajaan tiap tahunnya jauh di bawah target yang direncanakan.
2. Belum semua petani dapat memperoleh bantuan untuk kegiatan peremajaan, meskipun sudah memenuhi kebutuhan atau persyaratannya.
3. GAPKI berperan dalam kegiatan peremajaan dengan mendorong terjadinya kemitraan antara perusahaan anggota GAPKI dengan petani dalam bentuk kemitraan untuk mempercepat proses kegiatan peremajaan.
4. Program dan peremajaan Kelapa Sawit harus memperhatikan karakteristik petani, sehingga peremajaan dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik masing masing petaninya.
5. Pemerintah belum melakukan pembinaan kelembagaan petani sawit, sehingga dapat menjadi salah satu hambatan dalam hal memenuhi persyaratan untuk memperoleh program bantuan.
6. Pembentukan kelembagaan tani ditengarai hanya menjadi salah satu alat untuk mendapatkan dana, bukan untuk menjadi wadah dalam memberdayakan petani.
7. Pemerintah perlu memperhatikan terkait kompensasi biaya hidup terutama untuk petani yang semua lahannya diremajakan.
8. Pemerintah harus memiliki *roadmap* terkait karakteristik petani yang akan disasar dengan program peremajaannya.
9. Penggunaan surveyor untuk mandata petani peserta peremajaan dianggap tidak efektif, sebaiknya menggunakan infrastruktur Pemerintah yang ada di daerah dengan dukungan dana yang memadai.
10. Mengusulkan untuk mengubah BPDPKS karena dinilai tidak berpihak kepada petani dan tidak transparan.
11. Pelembagaan petani Kelapa Sawit sangat penting, karena pengembangan kebun Kelapa Sawit (termasuk hilirisasi industrinya) membutuhkan dana yang sangat besar. Dalam peremajaan kelapa sawit, petani harus memiliki mitra yang mampu memberikan perlindungan kepada petani dengan konsep kemitraan yang sejajar.
12. Pemerintah dinilai kurang melakukan sosialisasi program peremajaan sawit rakyat, tidak mengawal, dan tidak memberikan dana yang cukup. Selain itu,

menyarankan agar dana PSR dinaikkan menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan penggunaan dana BPDPKS profesional untuk GAPKI dan Petani (60% dan 40%) serta membentuk Kementerian yang khusus untuk sub sektor perkebunan, untuk mengelola sawit.

13. Petani dinilai telah melakukan subsidi penggunaan dan pengembangan biodiesel sejak dana perkebunan ini terkumpul dan dikelola oleh BPDPKS.
14. Kebijakan untuk mewajibkan petani sawit melaksanakan ISPO dalam waktu 5 tahun menjadi sangat memberatkan petani, karena waktu 5 tahun tidak cukup untuk mempersiapkan petani melaksanakan ISPO secara penuh.
15. Komisi IV DPR RI mengusulkan Panja mengenai Kelapa Sawit menjadi Pansus, karena melibatkan banyak pihak, sehingga bisa dilakukan pendalaman lebih lanjut dan komprehensif.
16. Komisi IV DPR RI meminta asosiasi untuk menyelesaikan dualisme yang ada.
17. Komisi IV DPR RI meminta asosiasi-asosiasi untuk memberikan data dan rekomendasi terhadap kebijakan PSR.
18. Komisi IV DPR RI mendukung agar dilakukan audit terhadap BPDPKS terkait aliran anggaran.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP.196508171988031002